

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abu Daud Busroh, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Batinggi, Ahmad 1999, *Manajerial Pelayanan Umum*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Danang Suwanda Dan Akmal Malik Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pegawai Yang Efektif*.
- Dr. Hendra Kariangga, 2007, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Irfan Fachruddin. 2004, *Pengawan Peradilan Adimistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Pt. Alummi.
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* ,Refika Aditama, Bandung 2009.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Inedph Publishing, Bandar Lampung, 2012.
- Sadu Wasistiono Dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)*, (Bandung: Fokusmedia, Tahun 2009.
- Sinambela, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*.
- Siswandi Dan Indra Imam, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Edisi Kedua, Penerbit: Mitra Wicana Media, Jakarta.

Sri Wahyuningsih. 2014, "*Pengaruh Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan (APBD) Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi*".

Sule Erni Trisnawati, Dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetak Pertama, Penerbit: Prenada Media Jakarta.

Sumitro Djojohadikusumo, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Victor, M. Situmorang, Dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KepMenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/72003 Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2010 Tentang Tata tertib DPRD kota yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

INTERNET

'penelitian empiris'' diakses dari situs: <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html> pada 29 november 2016, jam 23.35